

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN  
PEMBERDAYAAN PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA  
MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kutai Timur)**

Oleh : Rusmawati<sup>1</sup>; dan Wesley Liano Hutasoit<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

**ABSTRACT**

*East Kutai Regency as an integral part in the system of Regional Autonomy Government has the right, authority and obligation of autonomous regions to manage and manage their own government affairs and public interests of Samarinda City according to the laws and regulations. Autonomous Region is a legal community unity which has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs and public interests according to their own initiative based on community aspirations in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

*The process of community empowerment is one of the keys to social welfare. Community involvement, whether physically, thoughtfully, materially or financially, is expected to increase the sense of community and sense of belonging and process of empowerment to the community. Thus there is a strong link between empowerment and participation.*

*In community empowerment, community participation or involvement is needed in the implementation of empowerment, community participation based on self-willingness means that villagers participate in empowerment based on confidence and awareness that comes from within themselves.*

*Community empowerment can be defined as a process that builds people or communities through the development of community capacity, changes in community behavior, and community organizing. From these definitions, there are three main objectives in community empowerment: developing people's capacity, changing people's behavior, and organizing themselves.*

*The purpose of empowerment in the social and cultural field is to realize the welfare of the people which is characterized by the improvement of the quality of decent and dignified life and to give primary attention to the fulfillment of basic needs. The general targets to be achieved are increasing*

*life expectancy, declining rate of population growth, decreasing total birth rate, decreasing coarse mortality rate, increasing social and cultural resilience, increasing position and role of women, increasing active participation of youth, as well as increasing culture and sporting achievement. To achieve these objectives and targets, various social and cultural empowerment policies and programs have been implemented, covering the areas of health and social welfare, including population and family planning; culture; position and role of women.*

---

**Keywords:** *Community Participation, Social and Cultural Empowerment*

### ABSTRAK

Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintaha otonomi Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material maupun finansial diharapkan akan meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pemberdayaan pada komunitas tersebut. Dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara pemberdayaan dan partisipasi.

Dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pemberdayaan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pemberdayaan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan

kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Tujuan pemberdayaan di bidang sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program-program pemberdayaan di bidang sosial dan budaya, yang meliputi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, termasuk kependudukan dan keluarga berencana; kebudayaan; kedudukan dan peranan perempuan.

---

**Kata Kunci** : Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Sosial Budaya

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, peran serta, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil pemberdayaan yang telah dilaksanakan; mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan; mendorong perkembangan sistem pemberdayaan yang partisipatif; serta meningkatkan dan terpenuhinya sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembinaan sosial budaya masyarakat melalui paradigma pemberdayaan yang menitik beratkan pada strategi pemberdayaan dari bawah ke atas yang didasarkan pada mobilitas sumberdaya manusia, alam, dan kelembagaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kesatuan antara penduduk, sumber daya alam, dan organisasi kelembagaan masyarakat merupakan unsur paling utama dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan suatu wilayah. Masyarakat merupakan sentral pemberdayaan karena dari masyarakat dan oleh masyarakatlah proses pemberdayaan dapat dilaksanakan (*Safi'i. M, 2007:33*). Selain itu keberhasilan program pemberdayaan banyak ditentukan juga oleh sifat kemampuan dan ketrampilan para pemimpin yang ada di masyarakat dalam menggerakkan kegiatan pemberdayaan, pemimpin yang dapat membimbing dan membawa aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan wilayahnya secara tidak langsung akan dapat merangsang keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan atau dengan kata lain masyarakat ingin berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan pemberdayaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Di Kabupaten Kutai Timur Dengan Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur?”

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Di Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan penelitian dengan Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur

## **II. Kerangka Dasar Teori**

Memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.  
Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.  
Dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagaimasukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah.

Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

#### **A. Partisipasi Masyarakat**

Kegiatan partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam pemberdayaan. Untuk itu perlu ditumbuhkan partisipasi aktif masyarakat yang dilaksanakan dengan menumbuhkan adanya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat yang tercermin dengan adanya perubahan sikap, mental, pandangan hidup, cara berpikiran dan cara bekerja. partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Partisipasi ini tidak dapat dipaksakan melainkan didasarkan oleh kesadarannya dan disesuaikan dengan kemampuannya serta tergantung kepada profesinya masing-masing.pada kenyataannya, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi, dengan alasan yang bermacam-macam pula. Hal ini dapat disadari karena adanya beberapa faktor penyebab yang mungkin membuat mereka tidak tertarik untuk berpartisipasi. Sedangkan dorongan yang boleh dikatakan bersifat umum adalah apabila hasil partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung oleh mereka sendiri dan memberi keuntungan kepada mereka.

#### **B. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan menurut para ahli, menurut Suhendra (Khohirun, 2003:77) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Selanjutnya pemberdayaan menurut Ife (dalam Suhendra, 2006:75) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase thepower of disadvantage*)”. Sedangkan menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

### **C. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan di bidang sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian kasar, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program-program pemberdayaan di bidang sosial dan budaya, yang meliputi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, termasuk kependudukan dan keluarga berencana; kebudayaan; kedudukan dan peranan perempuan.

## **III PEMBAHASAN**

Pemberdayaan pada hakekatnya merupakan suatu instrumen perubahan sosial berencana yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan implikasinya serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan tindakan – tindakan yang dikembangkan oleh suatu masyarakat agar warga masyarakat dapat mengatasi masalah sosialnya atau semua bentuk investasi sosial yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan perorangan dan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan berbagai penyediaan sarana dan proses yang langsung berhubungan dengan penyembuhan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber sumber daya manusia dan perbaikan mutu kehidupan yang sarannya mencakup perorangan, keluarga dan usaha–usaha untuk memperkuat atau mengubah lembaga sosial.

Masyarakat sebenarnya memiliki banyak potensi baik dilihat dari sumber sumber daya alam maupun dari sumber sumber sosial dan budayanya. Masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan disalurkan akan menjadi energi yang besar untuk membangun. Didalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menduduki masyarakat pada posisi pelaku pemberdayaan yang aktif, bukan penerima pasif, konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan, mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok pemberian kekuatan kepada masyarakat.

Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan, permasalahannya harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan –

kebutuhannya, merumuskan rencana – rencananya serta melaksanakan pemberdayaan secara mandiri dan swadaya. Dengan kata lain gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan " dari, oleh dan untuk rakyat".

#### **A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.

Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur berhasilnya suatu program sebagaimana yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai oleh berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, dan makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lainnya dalam masyarakat.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Konsep pemberdayaan dalam hal ini pemberdayaan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pemberdayaan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pemberdayaan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*".

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson, dkk. 1994 *dalam* Sukmaniar, 2007).

Terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.
2. *Tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya.
3. *Tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya.
4. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.
5. *Tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik.
6. *Tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya.
7. *Tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

## **B. Proses Berjalannya Teori Pemberdayaan Di Masyarakat**

Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan pemberdayaan harus selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi masyarakat tersebut adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama dan cita – cita bersama.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan

kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan. Dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding. Dapat juga dengan menyediakan buku-buku bacaan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan atau peminatan masyarakat. Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian (Durudono, 2004:48).

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan di bagi dalam tiga tahap yaitu :

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pemberdayaan secara berkeadilan Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan merupakan

kegiatan integral yang harus ditumbuh kembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dari masyarakat secara sadar, bergairah dan bertanggung jawab.

Prof. Dr. Moh. Budiarta, (2001:55) mengemukakan bahwa bentuk partisipasi dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat, sosialisasi sangat diperlukan. Sosialisasi yang paling efektif dilakukan oleh aparat pemerintah jika dibantu oleh tokoh masyarakat setempat. Itupun dengan syarat tertentu yaitu, apabila aparat pemerintah dan tokoh masyarakat tersebut benar-benar jadi panutan masyarakat. Namun kecenderungan selama ini, tidak sedikit masyarakat yang tidak mempercayai aparat pemerintah setempat

#### 1. Teori Ketergantungan Kekuasaan

Power merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan dari Nicollo Machiavelli (*The Prince*, awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes (*Leviathan* abad, pertengahan-17). Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial.

#### 2. Teori Sistem

Perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran ini adanya proses diferensiasi. Asumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya.

#### 3. Teori Ekologi

Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial, kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Struktur organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu. Struktur organisasi akan tampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bentuk bagan organisasi.

#### 4. Teori Konflik

Konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam interaksi, semua pihak bersinggungan dan sering melahirkan konflik. Belajar dari konflik yang kemudian disadari menghasilkan kerugian para pihak akan memunculkan inisiatif meminimalisir kerugian itu. Caranya adalah mengupayakan damai untuk kembali hidup bersama. Dalam konteks demikian, konflik didefinisikan bukan dari aspek para pelaku konflik, tetapi merupakan sesuatu yang givendalam interaksi sosial. Konflik menjadi motor pergaulan yang selalu melahirkan dinamika dalam masyarakat. Dikenal beberapa pendekatan teoritis untuk menjelaskan konflik. Sebagai kenyataan sosial. Diantaranya pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi yang menjelaskan bahwa munculnya konflik dikarenakan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan.

#### 5. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Pada konteks pemberdayaan masyarakat maka teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya/ memiliki power selain uang, knowledge maka people juga mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power pada orang atau masyarakat itu.

Untuk mengetahui keinginan seseorang akan sangat terkait dengan tujuan di akhir orang tersebut. Seseorang dari pertanyaan tersebut mengarah kepada sebuah tujuan. Dalam hal ini, maka tujuan adalah pusat pendekatan yang strategis sebagai taktik, meskipun dalam pemahaman umum, telah keliru memahami bahwa strategi merupakan instrumen tujuan yang bersifat sementara mencerminkan budaya dan emosi.

Konsep Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006* Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga pada masyarakat (termasuk Adat) menyebutkan bahwa “Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pemberdayaan.

Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat, yaitu mempunyai tugas membantu Lurah

dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri:

**a. Penyadaran**

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan dari "tidur" keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan. Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang. Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya.

**b. Pelatihan**

Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumahtangga, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka. Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan.

**c. Pengorganisasian**

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir. Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari

beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan. Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

**d. Pengembangan kekuatan**

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada kesadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata "kami tidak bisa, kami tidak punya kekuatan".

**e. Membangun Dinamika**

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.

Proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material maupun finansial diharapkan akan meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pemberdayaan pada komunitas tersebut. Dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara pemberdayaan dan partisipasi. Pengertian partisipasi masyarakat adalah : (1) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan diri, kehidupan dan lingkungan mereka; (2) Partisipasi sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; (3) Partisipasi sebagai suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pemberdayaan yang telah ditentukan sendiri.

#### IV. PENUTUP

Proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material maupun finansial diharapkan akan meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pemberdayaan pada komunitas tersebut. Dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara pemberdayaan dan partisipasi.

Dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pemberdayaan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pemberdayaan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri.

Tujuan pemberdayaan di bidang sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian kasar, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program-program pemberdayaan di bidang sosial dan budaya, yang meliputi bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, termasuk kependudukan dan keluarga berencana; kebudayaan; kedudukan dan peranan perempuan.

Bentuk tugas dalam pemberdayaan Dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan atau yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang, terlindunginya anak, lanjut usia, dan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia, veteran, dan penyandang cacat, Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya

manusia yang produktif dan terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar.

Program dan sasaran dalam penanganan masalah sosial yang berhubungan dengan kebijakan publik merupakan Program yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial ke arah terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui wadah jaringan kerja. Sasaran kinerja program adalah terumuskannya dan terlaksananya kebijakan penanganan masalah-masalah sosial dalam keselarasan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui wadah jaringan kerja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu. Yogyakarta*
- Bungin, Burhan. 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikadi, Ekonomi, Kebijakan Publik, serta ilmu-ilmu sosial lainnya)*, Prenada Media, Jakarta
- Budiatna, Moh., 2001, *Sosialisasi Harus dibarengi Pengawasan, Media Partisipatif No. 2 Th. II Edisi Februari 2001.*
- Durudono, 2004, *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pendukung pembangunan Desa/Kelurahan (P3dK).*
- Edi Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, Jakarta.
- Erdjuna Rasdjan, 2009, *Implementasi program pengembangan Kecamatan dalam menunjang partisipasi masyarakat desa Jakarta: Bumi Aksara.*
- Fauzi Syam, 2002, *'Partisipasi publik terhadap kebijakan publik: Jakarta*
- Hikmat, Harry. 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Khohirun, 2003, *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, Bina Aksara.*
- Moebiyarto., *Strategi Pemberdayaan Yang Berkeadilan, Yayasan Mulya Bangsa, Yogyakarta.*

- Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Penebar Swadaya*. Cetakan pertama. Jakarta.
- Pangarusutamaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pemberdayaan, 2003., CV. CIPRUY, Jakarta
- Peraturan Presiden no 15 Tahun 2010 Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Rusmanto, Joni. 2013. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Zifatama Publishing. Sidoarjo.
- Safi'i. M. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jakarta: LP3ES
- \_\_\_\_\_ 2004, *Pangarusutamaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*, CV. CIPRUY, Jakarta.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo, 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sumardi, 2001, *Tesis, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan masyarakat*.
- Supriatna, Tjahya. 1997, *Birokrasi, Pemberdayaan Dan Pemengantasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press, Bandung. Soetrisno,
- Soetomo, *Strategi-strategi Pemberdayaan Masyarakat*. 2006, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.